

Analisis Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

Sri Ratna Dwi Lestari^{1*}, Arik Susbiyani², Ach Syahfudrin Z³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 August 2018
Received in revised form
01 October 2018
Accepted 18 October 2018
Available online 29
November 2018

Kata Kunci:

Pendapatan-LO, Beban-LO

Keywords:

Revenue-LO, Expenses-LO

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang laporan Operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan PSAP No. 12. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama dibidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang berupa Laporan Operasional tahun anggaran 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif (Deskriptive Analysis

Method) yaitu suatu metode yang menggambarkan terlebih dahulu mengenai pencatatan, pengakuan serta pelaporan pendapatan dan beban pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang yang kemudian disesuaikan dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan PSAP No. 12. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan, pengakuan serta pelaporan pendapatan dan beban yang telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional.

ABSTRACT

The problem in this study is whether the preparation of Consolidated Operations in Financial Management Board and Asset accordance with the PSAP No. 12 Report on Operations. This study aims to determine the suitability of the preparation of Operational Reports in Financial Management Board and Asset Lumajang with PSAP No. 12. The results of this study are expected to provide inputs, especially in the field of public sector accounting related to the Government Accounting Standards Based Accrual. This research was conducted at the Financial Management Board and Asset Lumajang. The data in this research is secondary data. Secondary data were obtained from the Financial Management Board and Asset Lumajang form Activities Report for the fiscal year 2016. The data analysis technique used is descriptive analysis method (Deskriptive Analysis Method) is a method of describing in advance regarding the recording, recognition and reporting revenue and the load on the Financial Management Board and Asset Lumajang which is then adjusted to a PSAP No. 12 Report on Operations. Research result show that the preparation of Consolidated Operations in Financial Management Board and Asset Lumajang accordance with PSAP No. 12. It can be seen from the recording, recognition and reporting of revenues and expenses in accordance with the PSAP No. 12 Report on Operations.

Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.

* Corresponding author.

E-mail addresses: sriratdwi@gmail.com (Sri Ratna Dwi Lestari)

1. Pendahuluan

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan dalam praktiknya kini diwarnai dengan adanya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi publik baik dipusat maupun di daerah. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Menurut Ratmono (2015). Laporan perasional yaitu menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas yang dikelola oleh Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Apabila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kejadian atau transaksi hanya dicatat jika kas telah diterima atau dibayarkan, tetapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengharuskan kejadian atau transaksi dicatat pada periode terjadinya. Pencatatan transaksi ini akan diikhtisarkan menjadi sebuah laporan keuangan berupa laporan operasional. Penyusunan laporan operasional ini dilakukan oleh semua SKPD, tidak terkecuali Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional. PSAP No. 12 menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pendapatan-LO dan beban, meliputi definisi, pencatatan, pengakuan dan pelaporan pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan pada sektor publik. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditempatkan dalam PP No 71 Tahun 2010. (Bastian:2010). Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (Singkali,2014) menyatakan bahwa "Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Menurut (Kusumah 2012) "Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala SKPD selaku pengguna anggaran diharuskan menyelenggarakan pencatatan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya.

Hasil wawancara di BPKAD Kabupaten Lumajang diketahui terdapat kelemahan dan masalah ketidakpatuhan terhadap PSAP Nomor 12. Hal tersebut dikarenakan beberapa kebijakan akuntansi terkait pendapatan dan beban pada Laporan Operasional belum diatur secara lengkap sehingga pertanggungjawaban dari suatu laporan keuangan kurang memberikan informasi yang jelas dan tepat akibatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tidak mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2015.

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Analisis Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang".

2. Metode

Objek pada penelitian ini adalah Laporan Operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2016. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang beralamat di Jln. Alun-alun Utara No. 7 Kabupaten Lumajang. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan data-data yang berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara berupa uraian pencatatan, pengakuan dan pelaporan beban badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu : a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung diolah oleh peneliti yakni data-data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian seperti data hasil wawancara dengan Kasubid Penyusunan Program dan Keuangan. B. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh setelah diolah oleh orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan struktur organisasi.

Metode pengumpulan data peneliti-an ini yaitu : Wawancara dilakukan melalui melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang terkait dengan akuntansi beban pada BPKAD Lumajang untuk Tahun Anggaran 2016.

Dokumentasi melalui teknik pengumpulan data berupa dokumen organisasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Teknik Analisis Data pada penelitian ini langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : Mengumpulkan data dan informasi, Mengumpulkan data dan informasi mengenai gambaran umum Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lumajang, struktur organisasi dan data terkait laporan operasional, Menelusuri dan mengidentifikasi proses penyusunan, pencatatan, pengakuan dan pelaporan laporan operasional terkait pendapatan dan bebann pada Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, Membandingkan pencatatan, pengakuan dan pelaporan laporan operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan PSAP No 12 yang mengatur, Menganalisis hasil perbandingan pencatatan, pengakuan dan pelaporan laporan operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan PSAP No 12 dan Memberikan kesimpulan atas hasil pembahasan.

3. Hasil dan Pembahasan

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Dandijabarkan dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2014, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2016. Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Lumajang yaitu : "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Memenuhi Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah". Misi : Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang/aset daerah, Mewujudkan pelayanan dibidang , Perbendaharaan dan informasi keuangan barang/aset daerah yang cepat, tepat dan akurat, Mewujudkan peningkatan pendapatan.

Penyusunan Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lumajang

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Lumajang menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD). Sebagaimana program aplikasi komputer yang lain, aplikasi ini memberikan banyak otomatisasi pekerjaan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan BPKAD Kabupaten Lumajang merupakan output (keluaran) dari input (masukan) berupa bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen seperti Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum atau formulir lainnya.

Pencatatan Pendapatan

Berdasarkan dokumen SPJ Penerimaan dan lampirannya, PPK-SKPD mencatat transaksi pendapatan dengan menjurnal "Kas di Bendahara Penerimaan" di Debit dan "Akun Pendapatan Sesuai Jenisnya" di Kredit. Pencatatan pendapatan tersebut dijelaskan sebagai berikut : Pencatatan pendapatan pajak daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lumajang menggunakan kode JU (jurnal umum) yaitu ketika diterbit-kan Surat Keterangan Pajak Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan meski belum diterima pembayaran dari wajib pajak. Dengan rincian pada tanggal 1/9/2015, BPKAD menerima pembayaran pajak dari entitas yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar Rp. 48.917.371.55. Oleh karenanya PPK SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjurnal :

Tabel 1. PPK SKPD

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
01/9/2015	1.2.1	Kas di Bendahara Penerimaan	48.917.307.155	
	2.1.4	Pendapatan Pajak Daerah		48.917.307.155

Pencatatan retribusi menggunakan kode JU (Jurnal Umum) pada saat diterbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKR), maka SKPD telah berhak mengakui pendapatan meskipun belum diterima.

Pembayaran oleh wajib retribusi (earned).

Dengan rincian yaitu pada tanggal 04/2/2016, BPKAD mengeluarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah atas pemakaian kekayaan daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar Rp. 10.000.000. Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang sehubungan dengan pendapatan retribusi daerah adalah :

Tabel 2. Retribusi daerah

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
04/2/2016	1.3.1	Kas di Bendahara Penerimaan	10.000.000	
		Pendapatan Retribusi Daerah		
	2.1.3			10.000.000

Pendapatan Hasil Pengelolaan Ke-kayaan Daerah yang Dipisahkan

Dengan rincian yaitu pada tanggal 01/5/2016, BPKAD mendapatkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba dari pemerintah daerah dan bagian laba dari lembaga keuangan sebesar Rp. 2.955.914.935 Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, maka jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang sehubungan dengan pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah :

Tabel 3. Pengelolaan Kekayaan Daerah

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
01/5/2016	4.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan	2.955.914.935	
	3.2.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.955.914.935

Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Dengan rincian yaitu pada tanggal 04/6/2016, BPKAD mendapatkan pendapatan asli daerah lainnya yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah sebesar Rp. 28.596.109.238.

Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang sehubungan dengan pendapatan Pendapatan Asli Daerah Lainnya adalah :

Tabel 4. PAD

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
04/6/2016	1.3.1	Kas di Bendahara Penerimaan	28.596.109.238	
	2.1.3	Lain-Lain yang sah PAD		28.596.109.238

Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang yaitu ketika : Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned* atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pelaporan Pendapatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang mencatat jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 80.479.331.328 yang terdiri dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 48.917.307.155, pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 10.000.000, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.995.914.935 dan pendapatan asli daerah lainnya sebesar Rp. 28.596.109.238.

Pencatatan Beban

Pada BPKAD Kabupaten Lumajang hanya memiliki beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyisihan piutang dan beban penyusutan. Pencatatan keempat beban ini dijelaskan sebagai berikut : Pencatatan Beban Pegawai, Pencatatan beban pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang menggunakan kode JU (Jurnal Umum). Maka jurnal yang dicatat yang berhubungan dengan beban pegawai pada BPKAD Kabupaten Lumajang adalah : Pada tanggal 05/8/2016, Bendahara Pengeluaran menerima SP2D atas pembayaran gaji Januari Rp. 142.893.000 berikut rinciannya : Gaji pokok Rp.120.000.000, Tunjangan Keluarga Rp.14.000.000. Tunjangan Jabatan Rp.8.900.000, Tunjangan PPh Rp.3.760.000, Tunjangan Beras Rp.9.800.000, Tunjangan PPh Rp.3.370.000. dengan potongan : Iuran Wajib Pegawai Negeri Rp. 12.862.000, Tabungan Pegawai Rp. 625.000, PPh Pasal 213.450.000.

Maka berdasarkan bukti SP2D tersebut, PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang mencatat jurnal sebagai berikut :

Tabel 5. Kas Bendahara

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
01/1/2016	3.1.3	R/K PPKD	142.893.0000	
	1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran		142.893.0000
	1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	142.893.0000	
	3.1.3	R/K PPKD (Saat SP2D di SKPD)		142.893.0000
	9.1.1	Beban Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran (saat dibayarkan kepada pegawai)	142.893.0000	142.893.0000

Pencatatan Beban Barang dan Jasa

Pencatatan beban barang dan jasa menggunakan kode JU (jurnal umum) pada saat pembelian barang dan jasa yaitu ATK. Sedangkan penyesuaian berhubungan dengan beban barang dan jasa pada akhir periode akan terisi secara otomatis. Sebagai jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang berhubungan dengan beban barang dan jasa yaitu: Tanggal 31/12/2016, total pemakaian barang dan jasa senilai Rp. 12.607.549.030. Berdasarkan stock opname, maka jurnal yang dicatat yaitu :

Tabel 6. Beban Barang Jasa

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
31/12/2016	9.1.2	Beban barang dan Jasa Persediaan	12.607.549.030	
	1.1.2			12.607.549.030

Pencatatan Beban Penyusutan

Aset tetap yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Lumajang berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan serta aset tetap lainnya. Perhitungan beban penyusutan pada BPKAD Kabupaten Lumajang menggunakan metode garis lurus. Penyusutan dilakukan berdasarkan harga perolehan tahun 2016. Penetapan umur manfaat aset tetap pada BPKAD Kabupaten Lumajang yaitu : Peralatan dan mesin dengan umur ekonomis 5 tahun. Gedung dan bangunan dengan umur ekonomis 20 tahun. Jalan, irigasi dan jaringan dengan umur ekonomis 10 tahun. Aset tetap lainnya dengan umur ekonomis 5 tahun. Jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang yang berhubungan dengan aset tetap yaitu :

Tabel 7. Beban Penyusutan

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
31/12/2016	9.1.7	Beban Penyusutan	1.5581.430.644	
	1.3.7	Aset Tetap Akumulasi Penyusutan		1.5581.430.644

Pencatatan beban penyisihan piutang

Jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang yaitu :

Tabel 8. Beban Penyisihan

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
31/12/2016	5.1.8	Beban Penyisihan Piutang	123.689.325	
	1.3.8	Penyisihan Piutang		123.689.325

Pengakuan Beban

Pengakuan beban pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang berupa pengeluaran atau timbulnya kewajiban atau konsumsi aset. Beban BPKAD Kabupaten Lumajang yaitu : Beban pegawai, merupakan beban yang berhubungan dengan pegawai yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lumajang yang berupa gaji serta tunjangan, honor serta tunjangan lainnya. Beban barang dan jasa yaitu beban yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa antara lain ATK, pembayaran listrik, air dan telepon. Beban penyusutan yaitu penurunan manfaat ekonomi atas aset tetap yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Lumajang. Beban penyisihan piutang, merupakan beban yang berhubungan dengan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari entitas lain setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Pelaporan Beban

BPKAD Kabupaten Lumajang mencatat jumlah beban sebesar Rp. 39.898.273.717 yang terdiri dari beban pegawai-LO sebesar Rp. 25.585.604.718, beban barang dan jasa sebesar Rp. 12.607.549.030, beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 1.581.430.644 dan beban penyisihan piutang sebesar Rp. 123.689.325. Jumlah defisit dari operasi pada BPKAD Kabupaten Lumajang yang berakhir 31 Desember 2016 yaitu Rp. 40.581.057.610

4. Simpulan dan Saran

Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lumajang untuk tahun anggaran 2016 telah sesuai dengan PSAP Nomor 12 yaitu tentang Laporan Operasional. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Penyusunan Laporan Operasional pada BPKAD Kabupaten Lumajang adalah : Pencatatan, pengakuan dan pengukuran Laporan Operasional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang :

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah : Untuk BPKAD Kabupaten Lumajang untuk lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan serta dapat menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu. BPKAD Kabupaten Lumajang sebaiknya memberi bimbingan dan pelatihan yang berhubungan dengan PSAP Nomor 12. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memasukan kota/kabupaten lain sebagai pembandingan dalam menganalisis kesesuaian penyusunan Laporan Operasional sehingga dapat dijadikan landasan untuk menggali penerapan PSAP Nomor 12 pada pemerintah daerah di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Achmad Fauzi. 2012. Akuntansi Pemerintah. Jakarta. IN Media
- Agoes, Sukrisno. 2013. Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik). Jakarta. Salemba Empat
- Ardiyos. 1996. Kamus Produksi dan Manajemen. Jakarta. Citra Harta Prima
- Arif, Bahtiar. dkk. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta. Erlangga
- Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta. Kencana.
- Chabib Soleh Dan Heru Rochmansyah. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung. Fokusmedia.
- Dunia Firdaus A. 2010. Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi Edisi Ketiga. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- E. Kieso, Donald, Jerry J, Weygandt and Teery D. Warfield, 2009. *Accounting Principles*, Edisi 12 by. Salemba Empat
- Erlina, Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Medan. Aksara
- Kusumah, A.A. (2012), "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya)", *Jurnal Akuntansi*, 2.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh. (2008, *April*), "Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Ekonomi Bisnis* 13(1), 49.
- S, Lalombombuida., J,Tinangon., H,Wokas., (2014). "Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud", *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi*, 2(1), 111-121.
- Singkali, Olga Yani Fransiska Dan Retnaningtyas Widuri. 2014. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten Toraja Utara". *Tax & Accounting Review, Vol 4, No 2, 2014 1*